

BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ASIA TENGGARA

Setiap negara di belahan bumi manapun tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya, suatu negara harus berinteraksi dengan negara lain untuk kelanjutan berdirinya negara tersebut agar kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi. Kehidupan sosial masyarakat dan teknologi terus menerus mengalami kemajuan dan perubahan dari waktu ke waktu dan sangat cepat. Kedua hal ini menyebabkan jarak antara negara semakin dekat dan batas-batas negara semakin tak terlihat. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki politik luar negeri agar dalam berhubungan dengan negara lain, negara tersebut berada dalam jalur dan arahan yang benar. Dalam bab ini akan dibahas mengenai politik luar negeri Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek hubungan internasional. Politik luar negeri juga melatarbelakangi peran serta Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik perbatasan Thailand-Kamboja.

A. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan

strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Eksistensi sebuah negara akan terlihat dari keaktifan negara tersebut dalam berhubungan dengan negara lain. Negara yang tidak berhubungan dengan negara lain akan dianggap tidak ada dan akan dikuasai oleh negara yang lebih besar, politik luar negeri sangat penting bagi setiap negara yang berinteraksi dengan negara lain.

Politik luar negeri adalah kebijakan dan langkah dari pemerintahan suatu negara dalam menentukan sikap atas permasalahan yang terjadi antar negara, dalam menjalankan fungsinya, sebagai subyek hubungan internasional.¹⁴ Setiap negara memiliki politik luar negeri yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang negara tersebut terhadap konflik dan masalah yang terjadi di sekitarnya. Setiap negara bebas menentukan sikap dan kebijakannya atas permasalahan yang terjadi antar negara. Politik luar negeri suatu negara menyesuaikan perkembangan masyarakat, keadaan sosial dan politik internasional, dan disesuaikan dengan keadaan dalam negeri negara tersebut. Dalam menentukan kebijakan luar negeri negaranya, pemimpin negara akan mengedepankan kepentingan negaranya. Disetiap keputusan dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan negaranya di lingkungan internasional.

¹⁴ <http://www.deplujunior.org/politik-luar-negeri-RI>

Untuk kelangsungan negaranya, pemerintah di negara tersebut akan menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, politik luar negeri dapat disebut sebagai upaya dari pemerintahan suatu negara untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dalam upaya mengedepankan kepentingan nasional sebuah negara, dapat dilakukan melalui jalur diplomasi dan negosiasi.¹⁵

Politik luar negeri suatu negara sangat bergantung pada pemimpin negara yang bersangkutan dan bagaimana pemimpin negara tersebut menanggapi isu-isu maupun masalah-masalah internasional, serta menilai negara-negara yang berada di sekitarnya. Sebuah negara bisa saja bersahabat atau bermusuhan dengan negara tertentu, sebuah negara bisa mendukung atau menentang kebijakan luar negeri negara lain.

B. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Politik luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan pencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan

¹⁵ <http://www.kompas.com/politik-luar-negeri-RI-harus-berpihak/prof.Dr.Emil.Salim>

tujuan dan kepentingan nasional.¹⁶ Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

Proses pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersebut diawali dengan penetapan kebijakan dan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." ini menjelaskan bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif.

Berikut ini adalah kutipan beberapa pendapat mengenai pengertian politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif.¹⁷

¹⁶<http://www.ideelok.com/politik/politik-luar-negeri-bebas-aktif-republik-indonesia>

1. B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.
2. Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.
3. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

¹⁷ *ibid*

Dari beberapa keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa arti dari politik luar negeri bebas aktif adalah indonesia bebas dan terlepas dari pengaruh dan kuasa pihak manapun dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya dalam merespon berbagai permasalahan internasional. Serta bersikap netral dan tidak memihak pada pihak manapun. Namun indonesia bekerja lebih giat demi meredanya ketegangan dan tercapainya perdamaian di dunia.

C. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh, serta merupakan bagian dari masyarakat internasional, Indonesia mempunyai dan melaksanakan politik luar negeri. Politik luar negeri tersebut merupakan bagian dari seluruh kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan untuk memelihara dan mencapai kepentingan nasional dalam hubungannya dengan luar negeri. Politik luar negeri yang juga merupakan pencerminan dari kepentingan nasional dibidang luar negeri, diwujudkan dalam beberapa kegiatan dengan negara-negara lain, baik dalam bilateral, maupun dalam bentuk kerjasama regional dan internasional.

Hubungan antar negara, politik luar negeri, dan diplomasi merupakan tiga bagian yang saling berkaitan dalam usaha setiap warga negara untuk menjamin kepentingan-kepentingannya dan untuk mencapai tujuannya.

Dalam politik luar negeri, pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijakan luar

negeri. Vitalitas usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui diplomasi yang bagi Indonesia berciri sebagai diplomasi perjuangan.¹⁸

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta anggota aktif sebagai masyarakat internasional, Indonesia juga aktif dalam percaturan politik dunia. Peran serta masyarakat bangsa-bangsa dan sikapnya dalam menghadapi berbagai masalah internasional bersumber pada falsafah pancasila, undang-undang dasar 1945, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

Dengan berlandaskan pada dokumen-dokumen tersebut, maka Indonesia melaksanakan hubungan luar negerinya untuk memenuhi tujuan nasional dan berpartisipasi dalam menangani berbagai masalah. Untuk itu, perlu adanya kondisi ketahanan nasional yang bagus yang menyangkut berbagai bidang, baik dari segi dalam negeri, maupun yang berhubungan dengan luar negeri.

Amanat GBHN 1999, bidang politik, poin ke-2 tentang hubungan luar negeri, butir C menyatakan: "meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan peluang positif bagi kepentingan nasional".¹⁹

¹⁸ Mochtar Kusumaatmaja, *Politik Luar Negeri dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Alumni, Bandung, 1983, Hal 5

¹⁹ Sjachwien Adenan, *Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Luar Negeri, No. 51, (Agustus 2003), Issn: 0215-1235

- **Landasan Idiil: Pancasila**

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan jawaban bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Pancasila sebagai dasar Negara mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan politik Negara agar selalu sesuai dan berlandaskan Pancasila. Atas dasar itu, Pancasila merupakan salah satu faktor obyektif yang berpengaruh dan menjiwai politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri suatu Negara biasanya didasarkan atas landasan-landasan tertentu yang pada hakekatnya merupakan kemudi pelaksanaannya. Untuk Negara Indonesia, Pancasila merupakan landasan Idiil politik luar negeri, terutama sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini menyangkut aspek kehidupan seluruh umat manusia yang mencita-citakan terwujudnya perikemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan ini mencerminkan azas keseimbangan dan keserasian, bukan saja dalam hubungan antar manusia, akan tetapi juga dalam hubungan antar bangsa di seluruh dunia. Dengan demikian, Pancasila sila kedua berlaku secara global.²⁰

D. Arahkan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Negara-negara di sekitar Indonesia menuntut Indonesia untuk lebih tegas dalam menjalankan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri Negara

²⁰ Djumadi M. Anwar, *Politik Luar Negeri Indonesia*. Diktat Pengantar untuk mahasiswa, Jurusan Hubungan Internasional, UMY 2004, Hal. 38

Indonesia harus berani untuk lebih adil dan berpihak pada masalah-masalah sosial seperti hak asasi manusia, dan genderisasi. Permasalahan sosial seperti hak asasi manusia dan genderisasi seringkali terabaikan.²¹ Maka Indonesia terus di tuntut untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia bebas dari segala pengaruh negara lain namun tetap selalu aktif dalam menjalankan dan menegakkan perdamaian dunia.

Demi membenahi politik luar negeri bebas aktifnya, Indonesia terus berupaya menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berani menentukan sendiri kebijakan luar negerinya, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia harus memiliki suatu arahan dan landasan yang jelas agar tidak menyimpang dari kepentingan nasional Negara Indonesia dan tidak mengesampingkan rakyat Indonesia.

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

Politik luar negeri Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: "Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan

²¹ Opcit, Kompas 11 Agt 2005

nasional”.²² Dalam menjalankan fungsi dari suatu negara, Indonesia berinteraksi dengan negara lain dalam tingkat internasional secara bebas aktif.

Politik luar negeri bebas aktif memiliki arti bahwa bebas yaitu Indonesia bebas dan terlepas dari kuasa dan pengaruh negara/bangsa lain dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya dalam merespon berbagai permasalahan internasional, baik itu konflik, sengketa, dan berbagai permasalahan internasional lainnya.²³ Indonesia bebas dalam menentukan sikap atas kebijakan luar negeri suatu negara. Indonesia berhak untuk menyetakan sikapnya, mendukung atau menentang kebijakan luar negeri Negara tersebut.

Politik luar negeri bebas aktif ini telah mengalami perubahan dalam pemaknaan kata bebas dalam politik luar negeri Republik Indonesia. Pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, definisi bebas dari politik luar negeri Indonesia yaitu tidak memihak pada kedua negara tersebut, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Indonesia aktif dalam berbagai upaya untuk mendamaikan kedua negara adidaya tersebut. Indonesia menjadi anggota organisasi Gerakan Non Blok, yaitu organisasi negara-negara yang pada waktu itu bersikap netral dan tidak memihak blok barat maupun blok timur. Negara-negara ini mengajak kedua belah pihak yang terlibat untuk tidak lagi bersaing namun harus saling mendukung kemajuan negara yang lainnya. Perubahan makna dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada negara-negara disekitar Indonesia. Perubahan ini

²² <http://www.deplujunior.go.id/politik.luar.negeri.republik.indonesia>

²³ *ibid*

juga dipengaruhi oleh figur pemimpin Indonesia serta kondisi sosial masyarakat Indonesia.

2. Keppri Tahun 2004

Politik luar negeri Republik Indonesia pada saat ini berdasarkan hasil rapat Keppri Tahun 2004, yaitu bahwa arahan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini adalah: (i) Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; (ii) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi regional; serta (iii) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pematapan perdamaian dunia.²⁴

Berdasarkan Keppri diatas, Indonesia mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai negara dan organisasi internasional dengan membawa nama baik Indonesia dan untuk meningkatkan mutu dan kualitas diplomat Indonesia. Seorang diplomat mengemban tugas penting yaitu, mengedepankan kepentingan nasional Indonesia untuk kelangsungan negara Indonesia. Kepiawaian berdiplomasi seora diplomat sangat menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kepentingan nasional suatu negara. Semakin aktif Indonesia di dalam organisasi-organisasi internasional maka suara dari Indonesia akan semakin didengar dan diperhatikan.

²⁴<http://www.deplu.org/visi.misi.arahan.kebijakan.luar.negeri.ri>

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia aktif dalam berbagai upaya perdamaian di dunia dan dalam penyelesaian konflik antar negara. Dalam menyelesaikan sebuah konflik antar negara, baik sebagai pihak yang berkonflik ataupun sebagai pihak penengah, Indonesia selalu mengutamakan perundingan dan negosiasi perdamaian untuk menyelesaikan konflik. Indonesia menolak peperangan dengan mengerahkan kekuatan militer dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik. Perundingan dan negosiasi perdamaian dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kepiawaiannya diplomat Indonesia dalam berdiplomasi demi mewujudkan kepentingan nasional Negara Indonesia, serta meningkatkan citra Indonesia dimata Internasional. Dengan mengirimkan delegasi untuk bernegosiasi dan berunding dalam upaya menyelesaikan konflik. Diplomat Indonesia akan dinilai kemampuannya dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi dan bernegosiasi.

Untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan perdamaian di dunia dan komitmen terhadap integrasi regional, Indonesia aktif menjadi anggota pada organisasi internasional regional maupun global yaitu PBB dan ASEAN. Dua organisasi internasional ini merupakan salah satu pintu gerbang bagi Indonesia untuk dapat berinteraksi/berhubungan dengan negara-negara lain.

E. Eksistensi Indonesia Dalam Hubungan Internasional

Berdasarkan arahan politik luar negeri Republik Indonesia yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dalam menjalankan politik luar negerinya,

Indonesia tidak terpengaruh oleh negara lain. Indonesia terus meningkatkan kualitas dan kecakapan diplomatnya. Melalui diplomat yang ditugaskan, Indonesia mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam ranah internasional. Indonesia juga tetap berkomitmen dalam penegakan perdamaian dunia dan integrasi regional dengan tetap aktif dalam organisasi regional dan global seperti ASEAN dan PBB. Kedua organisasi internasional ini merupakan salah satu pintu gerbang bagi Indonesia untuk dapat berhubungan dengan negara-negara lainnya. Disamping itu, Indonesia juga aktif dan turut serta dalam menyelesaikan konflik antar negara.

1. Keanggotaan Indonesia di PBB

Masyarakat dan negara-negara di dunia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Kecanggihan teknologi juga ikut berperan dalam memberikan perubahan pada masyarakat dan negara-negara di dunia. Kecanggihan teknologi menyebabkan batas-batas antar negara semakin tidak terlihat, hal seperti inilah yang kemudian memicu konflik antar negara. Atas dasar situasi inilah Indonesia aktif dalam menegakkan perdamaian di dunia, hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam undang undang 1945 alinea ke-4 yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia.

Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional. Langkah diplomatik dan

multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang dengan cara yang lebih agar dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan nasional.²⁵

Indonesia menolak segala bentuk peperangan untuk menyelesaikan konflik antar negara. Dalam menyelesaikan masalah dengan negara-negara di sekitarnya, Indonesia selalu mengupayakan perundingan dengan negosiasi dan diplomasi. Indonesia aktif berperan serta dalam berbagai upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam perlindungan hak asasi manusia, dimana Indonesia sangat peduli terhadap isu-isu yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia.

Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950an, pada tahun 1964-1965 Indonesia sempat keluar dari keanggotannya di PBB. Namun kemudian aktif kembali hingga saat ini. Keikutsertaan Indonesia di dalam organisasi internasional PBB merupakan sebuah wujud komitmen Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di dunia yang tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan untuk menciptakan perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. PBB didirikan atas dasar bahwa setiap negara berhak untuk merdeka dan menjamin penduduknya berada dalam keadaan aman dan damai tanpa ada gangguan dan tekanan dari luar maupun dari dalam negerinya sendiri.

²⁵ <http://www.deplu.org/landasan.visi.misi.polugri>

Prestasi Indonesia dalam PBB terus mengalami peningkatan. Kini Indonesia dipercaya untuk menjadi salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga menjadi anggota komisi HAM PBB. Prestasi ini menandakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan politik luar negeri RI yang bebas aktif. Hal ini juga menandakan bahwa peran serta Indonesia dalam upaya penegakan perdamaian dunia telah diakui oleh banyak negara, dan hal tersebut meningkatkan nama baik Indonesia di dunia Internasional. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam misi-misi PBB. Indonesia termasuk kedalam negara-negara anggota PBB yang sangat rutin mengirimkan pasukannya untuk mengawasi, mengamankan, dan meninjau daerah-daerah konflik. Jumlah tentara yang dikirimkan Indonesia dalam misi PBB terus meningkat setiap tahunnya.

Indonesia mengirimkan pasukannya untuk bekerjasama dengan pasukan perdamaian PBB mengamankan daerah konflik. Pasukan pengamanan di berbagai daerah konflik hanya ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga agar daerah tersebut tetap aman dan berada di bawah pengawasan pasukan perdamaian PBB., tidak untuk berperang. Sampai saat ini Indonesia masih terus bekerjasama dengan PBB untuk mengamankan wilayah-wilayah konflik. Pasukan perdamaian PBB atau sering disebut *UN peacekeeping forces* adalah tentara PBB yang bertugas mengawasi daerah konflik, melindungi rakyat sipil dari bahaya konflik, memastikan gencatan senjata, memberikan sarana dan prasarana untuk berdamai

antara pihak-pihak yang berkonflik.²⁶ Pasukan ini adalah gabungan dari negara-negara anggota PBB yang mengirimkan tentara nasionalnya untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam menjalankan tugasnya, seringkali pasukan PBB menjadi korban dan ada anggota pasukan PBB yang tewas dalam menjalankan misi tersebut.

Sejak tahun 1957 hingga sekarang, Indonesia aktif mengirimkan tentara nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan Garuda Indonesia untuk bekerjasama dengan pasukan perdamaian PBB mengamankan daerah-daerah yang rawan konflik. Pengiriman pasukan Garuda pada awal keanggotaan Indonesia di PBB merupakan langkah awal kepedulian Indonesia terhadap terciptanya perdamaian di dunia dan penegakan HAM. Pada tahun 1957 Indonesia mengirimkan pasukan Garuda I di Mesir, pengiriman pasukan Garuda I ini merupakan awal sejarah keikutsertaan Indonesia dalam operasi perdamaian PBB. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda II dan Garuda III di Kongo. Tidak semua pasukan Garuda yang bertugas dapat pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, ada yang cedera dan gugur dalam menjalankan tugas. Meskipun begitu, Indonesia tidak berhenti untuk mengirimkan pasukan Garuda untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Pada tahun 1990-an pasukan Garuda bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di daerah-daerah berkonflik seperti Mesir, Kamboja, Bosnia, dan lain-lain. Indonesia terus aktif dalam misi perdamaian PBB dan pasukan Garuda yang dikirim oleh Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 2006-2007 Indonesia mengirimkan pasukan Garuda

²⁶ "United Nation Peacekeeping Forces". Microsoft Encarta 2007 [CD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006

untuk bekerjasama dengan pasukan perdamaian PBB ke Lebanon. Misi ini merupakan misi PBB yang paling berbahaya.²⁷

2. Indonesia Aktif Dalam ASEAN

Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional Indonesia dalam tingkat regional, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerjasama diplomastik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (*concentric circles*). Lingkaran konsentris ini terdiri dari: Lingkaran pertama adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, dan Korea Selatan).²⁸

ASEAN merupakan prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia, karena negara-negara ASEAN merupakan lingkaran terdalam dari lingkaran-lingkaran konsentris pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris menegaskan besarnya pengaruh lingkungan eksternal terdekat terhadap situasi domestik Indonesia. Oleh karena itu, terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.²⁹

²⁷ <http://www.pralangga.org/indonesia.ikut.pasukan.perdamaian.pbb>

²⁸ <http://www.deplu.org/kepentingan.nasional.indonesia.di.dunia.internasional/Moenir.Ari.Soenanda>

²⁹ <http://www.scribd.com/doc/23430462/Bagaimana-Peran-Indonesia-Dalam-ASEAN>

Mengingat Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya, Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Indonesia seringkali dianggap oleh negara-negara di luar kawasan ASEAN sebagai tulang punggung ASEAN. Indonesia dianggap berpengaruh besar terhadap stabilitas regional Asia Tenggara. Sebagai contoh pernyataan yang dilontarkan Ketua Komisi Keamanan Parlemen Jepang, Chiken Kakazu pada saat bertemu dengan ketua Komisi I DPR RI, Theo Sambuagadi, Tokyo 11 Desember 2007, "Upaya menciptakan stabilitas di kawasan Asia Timur mau tidak mau akan menempatkan Indonesia sebagai pilar utamanya. Keamanan Asia Timur dipengaruhi stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dan tentu saja ini banyak dipengaruhi Indonesia".³⁰ Peran Indonesia di ASEAN sendiri tidak bisa diremehkan, Indonesia telah berkontribusi dalam berbagai bidang demi kemajuan ASEAN.

Salah satu butir tujuan dibentuknya ASEAN adalah mempercepat kerjasama ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya dikawasan ini guna menciptakan masyarakat sejahtera dan damai dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib di dalam hubungan di negara-negara kawasan ini serta mematuhi PBB. Indonesia mempertegas tujuan ASEAN dengan mengembangkan doktrin ketahanan nasional untuk mengatasi dan mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman dari luar dan dalam, bahkan berjuang untuk mencapai kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan konseptualisasi yang berlandaskan berdasarkan

³⁰ KapanLagi.com, Jepang Andalkan Peran Indonesia di ASEAN 2007 diunduh pada 12 Juni 2012

sejarah Indonesia selama perjuangan kemerdekaan dan paska kemerdekaan, dimana setiap gangguan dan ancaman hanya bisa diselesaikan Indonesia sendiri tanpa intervensi dari pihak lain.³¹

Berangkat dari pemahaman tersebut, Indonesia berusaha untuk membangun kemampuan bersama di antara masyarakat Asia Tenggara. Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang untuk mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dalam lingkup regional. Organisasi ASEAN adalah jembatan penghubung antara Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya untuk meningkatkan kerjasama bilateral. ASEAN juga merupakan organisasi yang membuktikan komitmen Indonesia untuk terus aktif dalam meningkatkan integrasi regional.

3. Indonesia Berperan Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Negara

Sikap Indonesia dalam menanggapi permasalahan internasional tidak dipengaruhi oleh kekuatan besar. Indonesia bebas untuk menentukan keputusan negaranya dalam menanggapi masalah-masalah internasional. Negara manapun tidak dapat mencampuri, mempengaruhi, dan memberikan tekanan kepada Indonesia dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya. Indonesia merupakan negara yang berani menentukan sikap dalam menanggapi persoalan, dan fenomena internasional yang terjadi.

³¹ Luhulima, CPF. Dkk. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 88

Dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, Indonesia tidak hanya bekerjasama dengan PBB, namun juga bekerjasama dengan organisasi maupun negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif. Dalam menyelesaikan konflik antar negara, Indonesia tidak tergantung pada organisasi internasional maupun negara besar. Untuk itu, Indonesia tidak ragu-ragu untuk turut serta dalam upaya-upaya penyelesaian konflik antar negara, ini terlihat dari peranan yang telah dilakukan Indonesia dalam membantu proses perdamaian diantara negara-negara yang terlibat konflik, sebagai wujud dari upaya Indonesia untuk mengedepankan perdamaian di dunia.

a. Konflik Bangsa Moro di Filipina

Pada tahun 1993, Indonesia diberi mandat sebagai ketua *Committee of Six*, yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) dengan pemerintah Filipina. Indonesia menjadi mediator untuk menegahi konflik Bangsa Moro dengan pemerintah Filipina. Indonesia melakukan perundingan damai pertama kali antara pemerintah Filipina dengan pejuang Moro di kepulauan Suluh, Filipina.

Pada saat melakukan perundingan, situasi sedang memanas. Filipina mengerahkan 4.000 pasukan marinir, sedangkan Misuari (Pimpinan MNLF) mengerahkan sekitar 7.000 pasukannya. Ini merupakan pertama kalinya kedua

tentara bertemu, dan Indonesia berani untuk melakukan perundingan demi terciptanya kesepakatan perdamaian diantara pihak yang berkonflik.³²

Setelah memakan waktu yang cukup panjang, Indonesia melalui utusannya berhasil meredakan ketegangan diantara pemerintah Filipina dan Pejuang Moro. Dari perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang cukup memuaskan. Presiden Filipina saat itu, Fidel V. Ramos, dan Nur Misuari (Pimpinan MNLF) akhirnya bersedia melakukan kompromi. MNLF kemudian bersedia menanggalkan tuntutan akan kemerdekaan penuh dan bersedia menerima otonomi luas dalam kerangka persatuan dan kesatuan Republik Filipina.³³

b. Konflik Kamboja

Indonesia berkontribusi dalam upaya penyelesaian masalah konflik Kamboja dan keterlibatan Vietnam mengintervensi Kamboja. Bersamaan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia berusaha keras menciptakan perdamaian dan ditunjuk sebagai interlocuter dalam resolusi konflik Kamboja.³⁴ Hal ini dilakukan pada Pertemuan Tahunan ASEAN Tingkat Menteri di Jakarta, yang tujuan utamanya adalah rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik Kamboja melalui jalan damai. Sebagai *interlocuter*, Indonesia melalui Menlu-nya pada masa itu mengupayakan cara-cara yang dinilai cukup efektif untuk menciptakan perdamaian dengan cepat.

³² <http://www.tempo.co.id/harian/profil/prof-hasanwir.html>

³³ *Ibid*

³⁴ <http://www.scribd.com/24673757/Diplomasi-Regional-Indonesia-Dalam-ASEAN>

Pada November 1985, Mochtar Kusumaatmadja selaku Menlu Indonesia mengemukakan gagasan mengenai “Pembicaraan Tidak Resmi” (*Cocktail Party*) dan Vietnam memberikan respon positif terhadap gagasan Indonesia ini dan setuju untuk mengadakan pertemuan kedua negara dengan negara-negara lain untuk proses penyelesaian masalah kamboja. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan Kesepakatan Ho Chi Minh City (*Ho Chi Minh City Understanding*).

Selain itu, Indonesia juga mengadakan kunjungan ke Uni Soviet untuk membicarakan konflik Kamboja dan sekaligus membujuk US untuk memaksa Vietnam menarik mundur pasukannya dari kamboja. Keberhasilan Indonesia ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan *Jakarta Informal Meeting (JIM) I* di Bogor yang menghasilkan beberapa keberhasilan, yang akhirnya berbuntut pada kesediaan Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja. Keberhasilan JIM I juga diikuti oleh pelaksanaan JIM II yang pada akhirnya melahirkan “19 Butir Pernyataan Konsensus Ketua JIM”.³⁵ Usaha yang dilakukan Indonesia ini akhirnya membuahkan keberhasilan dengan ditariknya pasukan Vietnam dari Kamboja, dan melahirkan kesepakatan perdamaian diantara pihak yang berkonflik.

Beberapa keterangan di atas tersebut merupakan bukti nyata peran Indonesia dalam menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi di antara negara-negara di sekitar Indonesia. Indonesia berperan baik dalam upaya penyelesaian konflik, baik itu sebagai mediator ataupun fasilitator. Ini merupakan wujud

³⁵ *Ibid*

komitmen indonesia melalui politik luar negerinya yang bebas aktif dalam upaya mengedepankan terciptanya perdamaian di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara khususnya di kawasan Indocina.